

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 *E-Budgeting*

2.1.1.1 Definisi *E-Budgeting*

E-budgeting, atau penyusunan anggaran merupakan proses vital dalam pengelolaan keuangan baik di sektor publik maupun swasta. Proses ini melibatkan estimasi pendapatan dan pengeluaran dalam periode tertentu, membantu dalam perencanaan dan pengendalian keuangan (Amrih, 2025:32). *E-budgeting* sebagai salah satu bentuk implementasi *e-government* dirancang untuk meningkatkan transparansi dengan menyediakan akses informasi yang mudah dan *real-time* (Fachrulla et al., 2025).

E-Budgeting merupakan salah satu bentuk aplikasi *e-government* dalam bidang anggaran. *E-budgeting* bisa diartikan sebagai informasi data-data keuangan melalui teknologi guna membantu meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah. Dimana sistem ini menyangkut pengelolaan uang rakyat (*public money*) yang dilakukan secara transparan, efisien, rasional dan berkeadilan termasuk dalam pengertian ini adalah adil secara gender sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*). Sedangkan reformasi anggaran tersebut (*budgeting reform*) itu meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran (Rihan Mustafa Zahri, 2020).

E-budgeting adalah sistem pengelolaan anggaran yang menggunakan teknologi informasi untuk merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan memantau anggaran

secara elektronik. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dengan mengurangi kesalahan manual dan mempercepat proses administrasi anggaran (Rihan Mustafa Zahri, 2020).

Dalam konteks institusi pendidikan, penerapan *e-budgeting* memiliki peran penting dalam meningkatkan tata kelola keuangan sekolah atau perguruan tinggi. *E-budgeting* memungkinkan pengelola keuangan di institusi pendidikan untuk melakukan perencanaan dan pelaporan anggaran secara lebih sistematis dan transparan (Ridhawati & Gorontalo, 2025). Hal ini tidak hanya memudahkan pengawasan internal, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas kepada *stakeholder* seperti orang tua, komite sekolah, dan pemerintah.

E-Budgeting di sekolah negeri Kota Tasikmalaya saat ini menggunakan ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) untuk mendukung tata Kelola dana BOS yang akuntabel. Penerapan Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS) sangat penting dalam pengelolaan dana BOS, organisasi sekolah akan kesulitan menempatkan dana BOS jika tidak menggunakan aplikasi tersebut (Arifudin, 2025).

Permasalahan yang dihadapi manajemen sekolah bermula dari kegagalan tim manajemen sekolah dalam menyusun rencana kerja anggaran sekolah pada Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS) dengan baik (Nuryana et al., 2024). Akibatnya, Dana BOS yang ada seharusnya digunakan oleh administrasi sekolah untuk meringankan tanggung jawab keuangan orang tua atas pendidikan anaknya, namun pada kenyataannya dana BOS digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan dana BOS.

2.1.1.2 Fungsi *E-Budgeting*

E-budgeting berfungsi sebagai katalis untuk inovasi lebih lanjut dalam penyediaan layanan publik. Dengan infrastruktur teknologi informasi yang sudah ada, pemerintah dapat lebih mudah mengintegritaskan sistem *e-budgeting* dengan inisiatif digital lainnya, seperti *e-government* (Amrih, 2025:14).

E-budgeting memiliki beberapa fungsi utama yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan, khususnya di institusi pendidikan, antara lain:

1. Perencanaan Anggaran yang Terstruktur

E-budgeting membantu institusi pendidikan dalam menyusun anggaran secara sistematis dan terstruktur. Dengan sistem elektronik, proses perencanaan anggaran menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat karena data dapat diinput, diolah, dan dianalisis secara *real-time* (Ridhawati & Gorontalo, 2025).

2. Pengendalian dan Pengawasan Anggaran

Fungsi pengendalian anggaran menjadi lebih efektif dengan *e-budgeting* karena seluruh transaksi dan realisasi anggaran tercatat secara digital dan dapat dipantau secara berkala. Institusi pendidikan dapat mengidentifikasi penyimpangan atau penggunaan dana yang tidak sesuai dengan rencana sehingga meminimalisir risiko penyalahgunaan dana (Ridhawati & Gorontalo, 2025).

3. Transparansi dan Akuntabilitas

E-budgeting meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan karena informasi anggaran dapat diakses oleh berbagai pihak terkait, seperti komite

sekolah, orang tua siswa, dan pemerintah. Dengan demikian, institusi pendidikan dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara terbuka, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan *stakeholder* (Ridhawati & Gorontalo, 2025).

4. Efisiensi Administrasi Keuangan

Penggunaan *e-budgeting* mengurangi beban administrasi manual yang memakan waktu dan rentan kesalahan. Institusi pendidikan dapat menghemat waktu dan sumber daya dalam proses penganggaran dan pelaporan keuangan, sehingga fokus dapat dialihkan pada peningkatan mutu pendidikan (Ridhawati & Gorontalo, 2025).

2.1.2 Akuntabilitas

2.1.2.1 Definisi Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggung jawaban (Rusdiana & Nasihudin, 2018:26). Secara lebih luas, akuntabilitas menuntut adanya keterbukaan, kejujuran, dan kesesuaian antara pelaksanaan tugas dengan peraturan, standar, maupun tujuan yang telah ditetapkan. Seseorang atau badan hukum yang diberi amanah harus mampu menjelaskan bagaimana wewenang yang diterima digunakan, apakah telah sesuai dengan ketentuan, serta apakah hasil yang dicapai telah memenuhi target yang direncanakan.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan penggunaan sumber daya kepada pihak yang berwenang atau publik. Dalam konteks pengelolaan keuangan, akuntabilitas berarti pengelola keuangan harus melaporkan dan menjelaskan penggunaan dana secara jujur, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola organisasi yang baik, yang memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder* (Wahyuni & Maison, 2022).

Akuntabilitas (*accountability*) secara harfiah dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban. Tetapi penerjemahan secara sederhana ini dapat mengaburkan arti kata *accountability* itu sendiri bila dikaitkan dengan pengertian akuntansi dan manajemen. Lebih lanjut dikaitkan bahwa konsep akuntabilitas tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Stewart tentang jenjang atau tangga akuntabilitas yang terdiri dari 5 (lima) jenis tangga akuntabilitas yaitu *accountability for probity and legality*, *process accountability*, *policy accountability*. Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2019:16). Hal tersebut memiliki arti bahwa pemerintah, baik Tingkat pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik atau dengan kata lain dapat diartikan akuntabilitas menyampaikan merupakan kewajiban pertanggung jawaban dan untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

2.1.2.2 Prinsip dan Aspek Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas adalah aturan dasar atau pedoman yang menekankan bahwa setiap individu atau organisasi wajib bertanggung jawab, menjelaskan, dan melaporkan kegiatan, keputusan, serta hasil yang dicapai kepada pihak yang berwenang atau pemangku kepentingan (Rusdiana & Nasihudin, 2018:193). Prinsip akuntabilitas meliputi transparansi, tanggung jawab, dan keterbukaan informasi. Aspek-aspek penting dalam akuntabilitas adalah pelaporan yang akurat, pengawasan yang efektif, dan evaluasi kinerja. Akuntabilitas juga menuntut adanya mekanisme sanksi jika terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan (Mutmaninnah & Furqani, 2022).

1. **Transparansi (*Transparency*):** Prinsip ini menekankan keterbukaan informasi kepada pihak yang berwenang atau masyarakat. Setiap tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya harus dapat diakses dan dipahami oleh *stakeholder*. Tanpa transparansi, akuntabilitas menjadi lemah karena sulit untuk memverifikasi kebenaran. Misalnya, dalam konteks pemerintahan, laporan keuangan publik harus dipublikasikan secara *real-time* untuk mencegah penyembunyian korupsi.

2. Tanggung Jawab (*Responsibility*): Ini adalah prinsip inti di mana pelaku wajib menanggung konsekuensi dari tindakannya. Tanggung jawab mencakup aspek moral, hukum, dan etis, di mana individu atau organisasi harus proaktif dalam melaporkan hasil kerja mereka. Prinsip ini mendorong budaya "jawab atas apa yang dilakukan," sehingga mencegah penyalahgunaan wewenang.
3. Partisipasi dan Responsivitas (*Participation and Responsiveness*): Akuntabilitas tidak hanya vertikal (ke atasan), tetapi juga melibatkan partisipasi *stakeholder* eksternal. Prinsip ini mengharuskan aktor untuk merespons masukan dari masyarakat atau mitra, sehingga keputusan menjadi lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan publik.
4. Sanksi dan Konsekuensi (*Sanctions and Consequences*): Prinsip ini menjamin adanya mekanisme penegakan, seperti hukuman administratif, hukum, atau reputasi, jika akuntabilitas dilanggar. Tanpa sanksi yang tegas, prinsip-prinsip lain menjadi tidak efektif, karena aktor tidak memiliki insentif untuk patuh.

Aspek akuntabilitas adalah unsur-unsur atau komponen-komponen yang menggambarkan bagaimana akuntabilitas diwujudkan dalam praktik, baik dalam organisasi, pemerintahan, maupun dalam pelaporan akuntansi (Rusdiana & Nasihudin, 2018:164). Aspek akuntabilitas menggambarkan dimensi atau bentuk pertanggungjawaban yang dapat diamati dalam praktik. Secara deskriptif, aspek-aspek ini dibedakan berdasarkan arah, jenis, dan ruang lingkupnya (Acheampong et al., 2023).

1. Aspek Vertikal (*Vertical Accountability*) ini melibatkan hubungan hierarkis, di mana bawahan bertanggung jawab kepada atasan atau otoritas yang lebih tinggi.

Contohnya, pegawai negeri sipil (PNS) melaporkan kinerja kepada kepala dinas. Aspek ini kuat dalam struktur birokrasi formal, tetapi rentan terhadap korupsi jika pengawasan lemah.

2. Aspek Horizontal (*Horizontal Accountability*) berfokus pada pengawasan antar-rekan atau institusi independen, seperti audit internal atau kolaborasi antar-departemen. Aspek ini mendorong *checks and balances*, di mana satu pihak memantau pihak lain pada tingkat yang sama, sehingga meningkatkan efisiensi tanpa bergantung pada hierarki.
3. Aspek Diagonal (*Diagonal Accountability*) ini adalah bentuk hibrida yang melibatkan masyarakat sipil atau media sebagai pengawas eksternal. Dalam era digital, aspek ini semakin relevan melalui platform seperti *e-government* atau *whistleblowing*. *Diagonal accountability* memperkuat akuntabilitas vertikal dan horizontal dengan menambahkan perspektif publik, terutama dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
4. Aspek Substantif vs Prosedural (*Substantive vs Procedural Accountability*) aspek substantif menilai hasil akhir (apakah tujuan tercapai), sementara prosedural menekankan proses (apakah prosedur diikuti). Dalam kajian teori, keduanya harus seimbang untuk menghindari "akuntabilitas palsu" di mana prosedur formal dipenuhi tapi hasilnya buruk.

2.1.2.3 Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah

Dalam institusi pendidikan, akuntabilitas keuangan sangat penting untuk memastikan dana yang diterima digunakan sesuai dengan tujuan pendidikan. Akuntabilitas di sekolah dapat diwujudkan melalui pelaporan keuangan yang jelas,

audit internal dan eksternal, serta keterlibatan *stakeholder* dalam pengawasan (Mardiasmo, 2019:22).

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam pengelolaan keuangan sekolah, hal ini mencakup proses perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan dan evaluasi penggunaan dana (Mardiasmo, 2019:20).

Akuntabilitas keuangan di sekolah meliputi dua aspek utama, yaitu:

1. Akuntabilitas Keuangan (*Financial Accountability*) menekankan pada sejauh mana dana sekolah, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) digunakan sesuai ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Akuntabilitas Kinerja (*Performance Accountability*) menilai sejauh mana penggunaan anggaran sekolah mampu menghasilkan output dan outcome yang bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidikan.

2.1.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas

Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas adalah kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, dan penngendalian akuntansi (Rusdiana & Nasihudin, 2018:65). Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas antara lain sistem pengelolaan keuangan, kompetensi pengelola, dukungan teknologi (*e-budgeting*), dan partisipasi *stakeholder*. Lingkungan organisasi yang transparan dan budaya kerja yang jujur juga memperkuat akuntabilitas. Faktor internal yang mempengaruhi akuntabilitas dari

kepemimpinan kepala sekolah memegang peranan paling sentral. Seorang kepala sekolah yang demokratis dan visioner akan menciptakan budaya kerja yang terbuka, mendorong komunikasi yang jujur mengenai anggaran dan program sekolah (Jaya & Yamin, 2025).

Hal ini harus didukung oleh komitmen dan kapasitas sumber daya manusia di sekolah, terutama para pengelola keuangan dan administrasi yang memahami prinsip tata kelola yang baik. Selain itu, sistem manajemen yang terstruktur, seperti adanya prosedur operasional standar (SOP) yang jelas untuk pengelolaan dana, serta peran aktif dari komite sekolah sebagai perwakilan orang tua, menjadi fondasi internal yang memperkuat praktik akuntabilitas dan transparansi dari dalam.

2.1.3 Partisipasi *Stakeholder*

2.1.3.1 Definisi Partisipasi *Stakeholder*

Partisipasi merupakan hak sekaligus kewajiban seseorang dalam kaitannya untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan kelompok. Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi *stakeholder* yang menekankan pentingnya keterlibatan (kepala sekolah, guru, dan komite sekolah) dalam pengambilan keputusan (Yuni Dharta, 2022:8).

Partisipasi adalah proses dimana *stakeholders* (warga sekolah dan masyarakat) terlibat aktif baik dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan atau pengevaluasian pendidikan sekolah. Partisipasi diharapkan dapat mendorong warga sekolah dan masyarakat sekitar untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan

keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengevaluasian yang menyangkut kepentingan sekolah, baik secara individual maupun kolektif, secara langsung maupun tidak langsung (Wahyuni & Maison, 2022).

Partisipasi *stakeholder* adalah keterlibatan aktif berbagai pihak yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan suatu kegiatan atau program. Dalam pengelolaan keuangan sekolah, partisipasi *stakeholder* meliputi keterlibatan guru, orang tua, komite sekolah, dan masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan dana. Partisipasi *stakeholder* meningkatkan legitimasi dan kualitas keputusan karena melibatkan berbagai perspektif dan kontrol sosial yang efektif (Wahyuni & Maison, 2022).

2.1.3.2 Peran dan Jenis *Stakeholder* dalam Institusi Pendidikan

Stakeholder memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan dan kontrol maka program-program penganggaran yang akan dilaksanakan dapat terealisasi dengan baik (Sumanjoyo Hutagalung & N, 2022:44). Dalam pendidikan, *stakeholder* utama meliputi guru, orang tua siswa, komite sekolah, dan pemerintah daerah. Setiap kelompok memiliki peran berbeda, misalnya guru sebagai pelaksana program, orang tua sebagai pengawas, dan pemerintah sebagai regulator (Nelvia, 2021).

Stakeholder dapat dibagi menjadi dua kategori utama, internal dan eksternal. Pada kategori internal terdapat siswa, peran siswa sangat sentral sebagai penerima utama layanan pendidikan. Peran utama guru adalah merancang dan melaksanakan kurikulum, memfasilitasi pembelajaran, menilai kemajuan siswa dan staf

administrasi, peran mereka lebih ke arah pengelolaan operasional, seperti penganggaran, rekrutmen, dan pemeliharaan fasilitas. Dari kategori eksternal terdapat orang tua, peran utama adalah memberikan dukungan di rumah, seperti pengawasan belajar dan motivasi, serta berkontribusi melalui biaya pendidikan atau kegiatan orang tua-guru.

2.1.3.3 Bentuk dan Tingkat Partisipasi *Stakeholder*

Bentuk partisipasi terbagi menjadi dua yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu *stakeholder* terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana *stakeholder* sebagai status bawahan atau pengikut. Adapun dalam partisipasi horizontal, *stakeholder* mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok *stakeholder* berpartisipasi horizontal satu dengan lainnya (Sumanjyo Hutagalung & N, 2022:10).

Partisipasi dapat berupa konsultasi, kolaborasi, atau pengambilan keputusan bersama. Tingkat partisipasi yang tinggi biasanya meningkatkan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas (Arnstein, 2015). Di sekolah, partisipasi *stakeholder* dapat diwujudkan melalui rapat komite, forum orang tua, dan pelaporan terbuka.

Berikut beberapa bentuk utama partisipasi *stakeholder* (Arnstein, 2015):

1. Pemberian Informasi (*Information Dissemination*), Ini adalah bentuk paling dasar, di mana organisasi menyampaikan fakta atau rencana kepada *stakeholder* tanpa mengharapkan respons langsung.

2. Konsultasi atau Survei (*Consultation*), *Stakeholder* diajak memberikan pendapat melalui mekanisme seperti kuesioner, wawancara, atau *polling online*.
3. Pertemuan dan *Workshop* (*Meetings and Workshops*), Ini melibatkan diskusi tatap muka atau virtual, seperti *focus group discussion* (FGD) atau sesi brainstorming.
4. Kolaborasi atau Kemitraan (*Collaboration/Partnership*), *Stakeholder* tidak hanya memberikan masukan, tapi ikut merancang atau melaksanakan inisiatif.
5. Pemantauan dan Evaluasi Bersama (*Joint Monitoring and Evaluation*), *Stakeholder* terlibat dalam mengawasi kemajuan dan mengevaluasi hasil.

Tingkat partisipasi mengukur seberapa besar kekuasaan atau pengaruh yang diberikan kepada *stakeholder* dalam proses pengambilan keputusan. Konsep ini sering diilustrasikan melalui model "Tangga Partisipasi" (*Ladder of Participation*) yang dikembangkan oleh (Arnstein, 2015), yang membagi partisipasi menjadi delapan tingkatan, dikelompokkan menjadi tiga kategori utama: non-partisipasi, tokenisme (partisipasi simbolis), dan kekuasaan warga (partisipasi substantif).

2.1.3.4 Pengaruh Partisipasi *Stakeholder* terhadap Pengelolaan Keuangan

Pengaruh partisipasi *stakeholder* terhadap pengelolaan keuangan adalah bagaimana keterlibatan berbagai pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal memengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan suatu organisasi (Sumanjoyo Hutagalung & N, 2022:25). Partisipasi *stakeholder* meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena adanya kontrol sosial dan pengawasan dari berbagai pihak (Nelvia, 2021).

Partisipasi *stakeholder* juga akan meningkatkan tata kelola keuangan yang baik, pengaruh partisipasi *stakeholder* signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan, pada institusi pendidikan partisipasi *stakeholder* meliputi kepala sekolah, bendahara dan guru yang mempunyai kewenangan untuk mengatur tata kelola keuangan di sekolah.

2.1.4 Transparansi

2.1.4.2 Definisi Transparansi

Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang relevan kepada pihak yang berkepentingan, transparansi sangat penting untuk keterbukaan dalam penyampaian kebijakan, proses pengambilan keputusan, dan alasan dibalik keputusan tersebut kepada publik (Yuni Dharta, 2022:3).

Transparansi keuangan adalah keterbukaan dan kemudahan akses informasi mengenai pengelolaan dan penggunaan dana kepada publik atau *stakeholder*. Transparansi memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui bagaimana dana diperoleh, dialokasikan, dan digunakan secara jelas dan akurat. Transparansi merupakan salah satu pilar tata kelola yang baik (*good governance*) yang dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mencegah praktik korupsi serta penyalahgunaan dana (Ningsih, 2022).

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lembaga Pendidikan yang tidak transparan akan menimbulkan kecenderungan publik berfikir negatif. Keterbatasan akses informasi

yang diberikan membuat publik tidak percaya lembaga pendidikan (Hidayah et al., 2025).

2.1.4.2 Pentingnya Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah

Transparansi penting untuk membangun kepercayaan *stakeholder* dan mencegah korupsi atau penyalahgunaan dana. Transparansi di sekolah dapat diwujudkan melalui laporan keuangan yang mudah diakses dan dipahami oleh semua pihak terkait (Mardiasmo, 2019:45). Transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah merupakan prinsip penting yang menjamin keterbukaan pihak sekolah dalam menyampaikan seluruh informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana kepada seluruh pemangku kepentingan seperti guru, siswa, orang tua, komite sekolah, dan pemerintah.

Transparansi menjadi bagian dari penerapan *good school governance* karena memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana pendidikan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), digunakan secara tepat sasaran. Keterbukaan ini meningkatkan akuntabilitas publik, karena setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi oleh berbagai pihak. Selain itu, transparansi juga berperan penting dalam mencegah penyimpangan dan korupsi, sebab laporan keuangan yang terbuka memberi peluang kepada *stakeholder* untuk melakukan pengawasan langsung terhadap penggunaan anggaran (Ningsih, 2022).

2.1.4.3 Mekanisme Transparansi Keuangan

Mekanisme transparansi keuangan adalah serangkaian prosedur, sistem, dan praktik yang diterapkan untuk memastikan bahwa informasi keuangan suatu

organisasi disampaikan secara terbuka, lengkap, akurat, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan yang berhak (Sumanjoyo Hutagalung & N, 2022:38). Mekanisme transparansi meliputi pelaporan rutin, audit keuangan, penggunaan teknologi informasi (misalnya *e-budgeting*), dan keterlibatan *stakeholder* dalam pengawasan (Kurniawan, 2020).

Untu memastikan penggunaan dana dan laporan keuangan yang jelas dan akurat, pengawasan dan evaluasi harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan dapat melihat dan memahami informasi. Pengendali dana harus memahami dan melaksanakan tugas mereka dengan tepat. Selain itu, mereka harus siap untuk memberikan penjelasan dan bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang mereka ambil (Ningsih, 2022).

2.1.4.4 Dampak Transparansi terhadap Akuntabilitas dan Kepercayaan *Stakeholder*

Pengaruh keterbukaan informasi keuangan dan operasional suatu organisasi dalam meningkatkan tingkat pertanggungjawaban organisasi (akuntabilitas) serta memperkuat kepercayaan *stakeholder* terhadap organisasi tersebut karena informasi yang jelas, akurat, dan dapat diakses memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai kinerja dan integritas organisasi secara objektif (Sumanjoyo Hutagalung & N, 2022:74).

Transparansi yang baik meningkatkan akuntabilitas pengelola keuangan dan memperkuat kepercayaan *stakeholder* terhadap institusi pendidikan. Dengan adanya transparansi keuangan pada sekolah maka akan menjamin keterbukaan pihak sekolah dalam menyampaikan seluruh informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, hingga

pertanggungjawaban penggunaan dana kepada seluruh pemangku kepentingan seperti guru, siswa, orang tua, komite sekolah, dan pemerintah (Hidayah et al., 2025).

Transparansi juga akan memudahkan *stakeholder* seperti orang tua atau Masyarakat untuk mengetahui dana yang diturunkan pemerintah seperti dana BOS digunakan secara tepat sasaran. Dengan adanya transparansi dana Pendidikan akan memastikan bahwa semua orang tahu bagaimana dana itu digunakan. Laporan keuangan harus jelas, rinci, dan mudah dipahami oleh semua orang pemangku kepentingan. Transparansi sistem informasi memungkinkan Masyarakat mengakses berbagai informasi tentang layanan publik (Nuriyawati dan Maryanto, 2025).

2.2 Kajian Empiris

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Pada penelitian ini penulis menyimpulkan referensi dari beberapa jurnal penelitian terdahulu sebagai acuan untuk mempermudah proses penelitian, antara lain:

Vanda (2020), meneliti tentang “Pengaruh Implementasi *E-Budgeting* terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Surabaya.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *e-budgeting* berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi serta akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini berarti bahwa penerapan sistem *e-budgeting* mampu meningkatkan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Cahya Wardani & Isnawati (2025), meneliti tentang “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pengawasan sebagai Variabel Moderasi.”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, serta penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, pengawasan terbukti mampu memperkuat hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan kinerja keuangan, sehingga pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih optimal dan terkontrol.

Sudyartini & Wafa (2024), meneliti tentang “Pengaruh Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan sektor publik. Semakin tinggi tingkat pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi yang diterapkan, maka semakin efektif pula kinerja pengelolaan keuangan instansi pemerintah dalam mencapai tujuan organisasi.

Wahyuni & Maison (2022), meneliti tentang “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi *Stakeholders* terhadap Efisiensi Pengelolaan Dana Pendidikan.” Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi berganda pada satuan pendidikan sebagai objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi *stakeholders* secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi pengelolaan dana pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pertanggungjawaban, keterbukaan informasi, dan keterlibatan pemangku kepentingan, maka semakin efisien pengelolaan dana pendidikan yang dilakukan. Temuan ini memperkuat pentingnya penerapan prinsip *good governance* dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pendidikan.

Ketut et al. (2024), meneliti tentang “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Ketepatan Waktu terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dengan Partisipasi Komite sebagai Variabel Moderasi.” Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *explanatory research* pada 12 SMA/SMK Negeri di Kabupaten Jember. Sampel penelitian berjumlah 120 responden yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara BOS, guru, dan komite sekolah, dengan teknik *purposive sampling*. Analisis data menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS-SEM) dengan bantuan Smart PLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan ketepatan waktu secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Selain itu, partisipasi komite terbukti memperkuat pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan ketepatan waktu terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS.

Adzkie et al. (2024), meneliti tentang “Manajemen Keuangan Sekolah: Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana.” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan studi kasus pada beberapa sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi melalui keterbukaan laporan keuangan serta akuntabilitas melalui mekanisme audit internal dan eksternal menjadi fondasi utama dalam pengelolaan dana sekolah yang efektif dan efisien. Penerapan kedua prinsip tersebut dapat mencegah penyalahgunaan dana, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Safitri et al. (2025), meneliti tentang “Akuntabilitas Keuangan Sekolah sebagai Upaya Transparansi Pengelolaan Dana Pendidikan di SMK Muhammadiyah

Wonomulyo.” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah telah menerapkan akuntabilitas keuangan melalui pencatatan keuangan yang terstruktur, pelaporan rutin (bulanan, triwulanan, dan tahunan), serta pelibatan komite sekolah dan wali murid dalam evaluasi keuangan. Transparansi penggunaan dana, termasuk dana BOS dan donasi, mampu meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan sekolah.

Cuadrado-ballesteros & Bisogno (2022), meneliti tentang “*Budget Transparency and Financial Sustainability*.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara transparansi anggaran dan keberlanjutan keuangan pemerintah pada tingkat pemerintah pusat. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode ekonometrika pada sampel 110 negara selama periode 2008–2019. Variabel transparansi anggaran diukur menggunakan *Open Budget Index* (OBI) yang diterbitkan oleh *International Budget Partnership*, sedangkan keberlanjutan keuangan diukur melalui beberapa indikator seperti keseimbangan fiskal, tingkat utang jangka pendek, beban pajak, dan pertumbuhan ekonomi. Analisis data dilakukan dengan metode *Generalized Method of Moments* (GMM) untuk mengatasi potensi masalah endogenitas.

Lisa Amelia & Hidajat (2025), meneliti tentang “Pengaruh Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Keuangan Instansi Publik.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan instansi publik. Hal ini mengindikasikan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan serta

keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban manajemen keuangan dapat meningkatkan kualitas kinerja keuangan sektor publik.

Sanjaya et al. (2025), meneliti tentang “Penerapan *E-Budgeting* untuk Mendukung Transparansi Anggaran (Studi Kasus: Pemerintah Kota Surakarta).” Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis implementasi *e-budgeting* dalam tata kelola keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-budgeting* di Kota Surakarta mampu meningkatkan efisiensi administrasi, memperkuat transparansi anggaran, serta mendorong partisipasi publik melalui akses informasi keuangan yang terbuka.

Purwanti et al. (2024), meneliti tentang “*Participatory Budgeting in Emerging Economies: Enhancing Transparency and Accountability.*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganggaran partisipatif mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah melalui keterlibatan langsung masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran. Meskipun menghadapi tantangan seperti resistensi birokrasi, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya literasi anggaran masyarakat, penganggaran partisipatif terbukti memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Nelvia (2021), meneliti tentang “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi Pemerintahan, dan Akuntabilitas Publik terhadap Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).” Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 145 responden di SMP Negeri Kecamatan Rimbo Ulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, transparansi pemerintahan, dan akuntabilitas publik secara simultan berpengaruh

signifikan terhadap efisiensi penyaluran dana BOS, dengan nilai koefisien determinasi sebesar 82,5%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keterlibatan masyarakat, keterbukaan informasi, dan pertanggungjawaban publik, maka semakin efisien penyaluran dana BOS dalam mendukung kegiatan pendidikan.

Jaya & Yamin (2025), meneliti tentang “Pengaruh Penerapan *E-Government*, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.” Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan analisis regresi linier berganda terhadap 100 responden masyarakat Kelurahan Menala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan *e-government*, akuntabilitas, dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Secara parsial, *e-government* dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan akuntabilitas berpengaruh positif namun tidak signifikan. Nilai koefisien determinasi sebesar 20,8% menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut mampu menjelaskan variasi kepercayaan masyarakat sebesar 20,8%, sementara sisanya dipengaruhi faktor lain.

(Fuji Oktaviani et al., 2019), meneliti tentang “*E-Budgeting for Public Finance Transparency and Accountability*.” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilakukan pada 10 SKPD di Jakarta. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan *Structural Equation Modeling* (SEM) untuk menguji kesesuaian model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *e-budgeting* berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Sistem *e-budgeting* mempermudah akses informasi anggaran kepada masyarakat,

meningkatkan pengawasan publik, serta meminimalkan potensi penyimpangan anggaran. Temuan ini menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan anggaran pemerintah mampu memperkuat prinsip *good governance* melalui transparansi dan pertanggungjawaban yang lebih terbuka.

(Al, 2025), meneliti tentang “Pengaruh Implementasi *E-Budgeting*, *E-Procurement*, Komitmen Organisasi, dan Akuntabilitas terhadap Transparansi Keuangan Publik di Kota Palangka Raya.” Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan analisis regresi berganda pada organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Palangka Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *e-budgeting* dan *e-procurement*, komitmen organisasi, serta akuntabilitas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan publik. Secara parsial, variabel-variabel tersebut juga menunjukkan pengaruh positif terhadap peningkatan transparansi. Temuan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem digital dalam pengelolaan anggaran, didukung oleh komitmen organisasi yang kuat dan akuntabilitas yang baik, mampu meningkatkan keterbukaan informasi keuangan pemerintah daerah.

(Maslufi et al., 2025), meneliti tentang “Pengaruh Transparansi dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Sekolah terhadap Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Sekolah.” Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi berganda pada SMK Swasta Al Ihsan Jakarta Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan tanggung jawab pengelolaan keuangan sekolah secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pemanfaatan anggaran sekolah. Nilai koefisien determinasi sebesar 87,2%

menunjukkan bahwa efektivitas anggaran sangat dipengaruhi oleh kedua variabel tersebut. Temuan ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi keuangan serta pertanggungjawaban yang jelas menjadi faktor kunci dalam optimalisasi penggunaan dana pendidikan.

(Erbara, 2022), meneliti tentang “*Systematic Literature Review: Implementasi Prinsip-Prinsip Administrasi Keuangan di Indonesia.*” Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan menganalisis artikel-artikel terindeks SINTA periode 2016–2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip administrasi keuangan di sektor publik Indonesia berfokus pada aspek akuntabilitas, transparansi, pengendalian anggaran, dan pemanfaatan teknologi informasi. Studi ini menemukan bahwa penerapan sistem informasi berbasis *website* serta penguatan sistem pengendalian internal menjadi faktor dominan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan publik. Namun demikian, masih terdapat kendala pada kualitas sumber daya manusia dan konsistensi penerapan prinsip *good financial governance*.

(Erdianti et al., 2023), meneliti “Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang baik dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara serta kepercayaan publik terhadap pemerintah. Temuan ini menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih dan berintegritas.

(Vredi Nugroho & AYem, 2021), meneliti tentang “*The Effect of E-Budgeting, Disclosure, and Internal Control on Financial Management Transparency.*”

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *e-budgeting* dan *disclosure* laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Namun, variabel pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi serta keterbukaan penyajian laporan keuangan menjadi faktor utama dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan sektor publik.

(Fachrulla et al., 2025), meneliti tentang “Peran *E-Budgeting* dalam Meningkatkan Transparansi APBD.” Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk menganalisis implementasi *e-budgeting* sebagai bagian dari *e-government*. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan *e-budgeting* berperan penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan APBD melalui penyediaan akses informasi anggaran secara real time kepada masyarakat. Namun demikian, keberhasilan *e-budgeting* sangat dipengaruhi oleh perilaku individu, literasi digital, serta kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pemerintah daerah.

Tabel 2. 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No.	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	(Vanda, 2020) Pengaruh Implementasi <i>E-Budgeting</i> terhadap Transparansi dan Akuntabilitas.	Variabel Independen: <i>E-Budgeting</i> Variabel Dependen: Transparansi	Objek: Pemerintahan Kota Surabaya	Implementasi <i>e-budgeting</i> berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. <i>e-</i>	Vanda Indhiaura (2020), Artikel Ilmiah STIE.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Surabaya			<i>budgeting</i> terbukti berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Sistem ini memungkinkan setiap tahapan penganggaran	Perbanas Surabaya
2.	(Cahya Wardani & Isnowati, 2025) – Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Privinsi Jawa Tengah dengan Pengawasan Sebagai Variabel Moderasi.	Variabel Independen: Akuntabilitas Variabel Dependen: Transparansi	Variabel Independen: Penerapan Anggaran Variabel Dependen: Kinerja Keuangan	Akuntabilitas, transparansi, dan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan; pengawasan memoderasi sebagian hubungan.	<i>COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting</i> , Vol. 8 No. 4, 2025.
3.	(Sudyartini & Wafa, 2024) – Pengaruh Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Yogyakarta	Variabel Independen: Akuntabilitas Variabel Dependen: Transparansi	Variabel Dependen: Efektivitas Pengelolaan Dana BOS	Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS.	<i>Journal on Education</i> , Vol. 6 No. 3, hlm. 17807–17816.
4.	(Wahyuni & Maison, 2022) – Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi <i>Stakeholders</i> terhadap Efisiensi Pengelolaan Dana Pendidikan.	Variabel Independen: Akuntabilitas, Partisipasi <i>Stakeholder</i> Variabel Dependen: Transparansi	Variabel Dependen: Efisiensi Pengelolaan Dana Pendidikan	Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi <i>stakeholder</i> berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pengelolaan dana pendidikan	<i>Journal of Innovation Research and Knowledge</i> Vol.2,No.5, Oktober 2022, ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN2798-3641 (Online).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	(Ketut et al., 2024) – Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Ketepatan Waktu terhadap Pengelolaan Dana BOS dengan Partisipasi Komite sebagai Variabel Moderasi	Variabel Independen: Akuntabilitas Variabel Dependen: Transparansi	Variabel Independen: Ketepatan Waktu Variabel Dependen: Pengelolaan Dana BOS Variabel Moderasi	Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi komite berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS	(Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha Vol: 15 No: 03 Tahun 2024.
6.	(Rahma Adzkia et al., 2024) – Manajemen Keuangan Sekolah: Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana	Variabel Independen: Akuntabilitas Variabel Dependen: Transparansi	Variabel Dependen: Pengelolaan Dana	Transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi penting dalam pengelolaan dana sekolah yang efektif dan efisien	Jurnal Manajemen dan Pendidikan, Volume 2, No. 3, Desember 2024; 278-289.
7.	(Safitri et al., 2025) – Akuntabilitas Keuangan Sekolah sebagai Upaya Transparansi Pengelolaan Dana Pendidikan di SMK Muhammadiyah	Variabel Independen: Akuntabilitas Variabel Dependen: Transparansi	Objek: SMK Muhammadiyah Wonomulyo	Akuntabilitas keuangan yang diterapkan secara partisipatif meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik	Jurnal E-Business, Vol. 5 No. 1 (2025), ISSN:2807-6354 (Online)
8.	(Cuadrado-ballesteros & Bisogno, 2022) – <i>Budget Transparency and Financial Sustainability.</i>	Variabel Dependen: Transparansi		Transparansi anggaran berhubungan positif dengan keberlanjutan keuangan pemerintah.	<i>Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management.</i>
9.	(Lisa Amelia & Hidajat, 2025) – Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Keuangan Instansi Publik	Variabel Independen: Partisipasi <i>Stakeholder</i> , Akuntabilitas Variabel Dependen: Transparansi	Variabel Dependen: Kinerja Keuangan	Partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan instansi publik.	Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 8 No. 2, 2025.
10.	(Sanjaya et al., 2025) – Penerapan <i>E-Budgeting</i> Untuk Mendukung	Variabel Independen: <i>E-Budgeting</i>	Objek: Pemerintahan Kota Surakarta	Penerapan <i>e-budgeting</i> meningkatkan efisiensi administrasi,	<i>ANTASEN A: Governance and Innovation</i>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Transparansi Anggaran Studi Kasus: Pemerintah Kota Surakarta	Variabel Dependen: Transparansi		transparansi anggaran, dan partisipasi publik	<i>Journal</i> , Vol. 3 No. 1, 2025.
11.	(Purwanti et al., 2024) – <i>Participatory Budgeting in Emerging Economies Enhancing Transparency and Accountability</i> .	Variabel Independen: Partisipasi <i>Stakeholder</i> Variabel Dependen: Transparansi	Objek: Pemerintah di Negara Berkembang	Penganggaran partisipatif terbukti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.	CosmoGov : Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 10, No. 2, 2024. P-ISSN 2442-5958. E-ISSN 2540-8674.
12.	(Nelvia, 2021) – Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi Pemerintahan dan Akuntabilitas Publik terhadap Efisiensi Penyaluran Dana BOS di SMP Negeri Kecamatan Rimbo Ulu.	Variabel Independen: Partisipasi <i>Stakeholder</i> , Akuntabilitas Variabel Dependen: Transparansi	Variabel Dependen: Efisiensi Penyaluran Dana	Partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap efisiensi penyaluran dana BOS.	Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Volume 1 No 1 Tahun 2021 E-ISSN: 2776-3668 P-ISSN: 2798-1568.
13.	(Jaya & Yamin, 2025) – Pengaruh <i>Penerapan E-Government</i> , Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah	Variabel Independen: Akuntabilitas Variabel Dependen: Transparansi	Variabel Independen: <i>E-Government</i> Variabel Dependen: Tingkat Kepercayaan Masyarakat	E-Government dan Transparansi berpengaruh signifikan Terhadap kepercayaan masyarakat, sedangkan Akuntabilitas tidak signifikan.	JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) (eISSN: 2614-8854) Volume 8, Nomor 5, Mei 2025 (5075-5080).
14.	(Fuji Oktaviani et al., 2019) – <i>E-Budgeting for Public Finance Transparency and Accountability</i> .	Variabel Independen: <i>E-Budgeting</i> Variabel Dependen: Transparansi	Objek: Pemerintah Daerah (SKPD)B	Implementasi <i>e-budgeting</i> di pemerintah kota telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan berdasarkan regulasi	<i>International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)</i> . ISSN: 2277-3878, Volume-8 Issue-2S4, July 2019.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				pengelolaan keuangan daerah.	
15.	(Novika Ayu et al., 2025) – Pengaruh Implementasi <i>E-Budgeting</i> , <i>E-Procurement</i> , Komitmen Organisasi, dan Akuntabilitas - terhadap Transparansi Keuangan Publik di Kota Palangka Raya.	Variabel Independen: <i>E-Budgeting</i> , Akuntabilitas Variabel Dependen: Transparansi	Variabel Independen: <i>E-Procurement</i> , Komitmen Organisasi	<i>E-Budgeting</i> tidak berpengaruh signifikan, sedangkan <i>E-Procurement</i> dan Komitmen Organisasi berpengaruh signifikan terhadap transparansi keuangan publik	Jurnal Manajemen dan Akuntansi Volume 5, Nomor 2, April 2025 e-ISSN: 2962-3987 p-ISSN: 2962-4428, Hal. 421-438.
16.	(Maslufi et al., 2025)– Pengaruh Transparansi dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Sekolah terhadap Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Sekolah	Variabel Independen Variabel Dependen:		Transparansi dan tanggung jawab berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pemanfaatan anggaran sekolah.	Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsuraya, p-ISSN 2460 - 7045; e-ISSN 2654 – 4628 DOI: 10.35968/jbau Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsuraya, Vol. 10.
17.	(Erbara, 2022) – <i>Systematic Literature Review</i> : Implementasi Prinsip-prinsip Administrasi Keuangan di Indonesia.	Variabel Independen: Akuntabilitas Variabel Dependen: Transparansi	Variabel Independen: Efektivitas, Efisiensi	Hasil menunjukkan bahwa prinsip transparansi akuntabilitas, dan efektivitas menjadi dasar keberhasilan administrasi keuangan publik di Indonesia.,	Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi VOL. 2, NO 1, 2022 (1-10) EISSN: 2777-0184 PISSN: 2797-2259,
18.	(Erdianti et al., 2023) – Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara.	Variabel Independen: Akuntabilitas Variabel Dependen: Transparansi	Variabel Independen: Pengelolaan Keuangan Negara	Transparansi dan akuntabilitas meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.	Ekoomic Rreview Journal, Volume 4 Nomor 1 (2025) 235 – 244 E-ISSN 2830-6449 DOI:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					10.56709 mtj. v4i1.632/
19.	(Vredi Nugroho & Ayem, 2021) – <i>The Effect of E-Budgeting, Disclosure, and Internal Control on Financial Management Transparency</i>	Variabel Independen: <i>E-Budgeting</i> Variabel Dependen: Transparansi	Variabel Independen: Pengungkapan, Pengendalian Internal	<i>E-Budgeting</i> dan pengungkapan laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi keuangan, sedangkan pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan.	<i>Accounting Research Journal of Sutaatmadja (ACCRUA LS)</i> , Vol. 5 No. 2, 2021, hlm. 1–13.
20.	(Fachrulla et al., 2025) – <i>Literature Study on the Role of E-Budgeting in Increasing APBD Transparency</i>	Variabel Independen: <i>E-Budgeting</i> Variabel Dependen: Transparansi	Variabel Independen: Perilaku Individu	<i>E-Budgeting</i> berperan penting dalam meningkatkan transparansi APBD dan akuntabilitas pemerintah daerah, namun dipengaruhi oleh perilaku individu dan literasi digital masyarakat.	<i>Journal of Scientific Interdisciplinary</i> , Vol. 2 No. 2, 2025, hlm. 1–7.
Syalwa Zamzami Ridwan (2026) Pengaruh Penerapan <i>E-Budgeting</i> , Akuntabilitas, dan Partisipasi <i>Stakeholder</i> terhadap Transparansi Keuangan di Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Tasikmalaya					

2.3 Kerangka Pemikiran

Transparansi merupakan salah satu pilar utama dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Transparansi keuangan di institusi pendidikan, khususnya di SMA Negeri, memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa dana pendidikan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) digunakan secara efektif dan akuntabel (Ningsih, 2022). Namun, dalam praktiknya, penerapan transparansi di SMA Negeri Kota Tasikmalaya masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menelaah faktor-faktor yang diduga memengaruhi tingkat transparansi keuangan sekolah.

Faktor pertama adalah penerapan *e-budgeting*. Sistem ini merupakan inovasi teknologi informasi yang mengintegrasikan proses anggaran secara elektronik sehingga memudahkan akses, mempercepat perencanaan dan pelaporan, serta meminimalisir intervensi manual yang rentan terhadap penyimpangan (Al, 2025). Dalam konteks pendidikan, penerapan *e-budgeting* diwujudkan melalui penggunaan ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Keuangan Sekolah) yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Arifudin, 2025). Dengan adanya sistem ini, diharapkan transparansi keuangan sekolah dapat meningkat karena informasi anggaran lebih terbuka dan akurat.

Faktor kedua adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban pengelola sekolah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada mereka. Transparansi sendiri merupakan prinsip utama dari akuntabilitas, sehingga semakin tinggi tingkat akuntabilitas manajemen sekolah, semakin besar pula dorongan terhadap praktik pengelolaan keuangan yang transparan (Vanda, 2020). Akuntabilitas menuntut kejelasan peran dan tanggung jawab, kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi, serta kejujuran dalam pelaporan keuangan yang didukung oleh mekanisme pengawasan dan evaluasi.

Faktor ketiga adalah partisipasi *stakeholder*. Guru, orang tua, dan komite sekolah berperan sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif. Keterlibatan mereka dalam proses perencanaan, pengawasan, dan pemberian masukan mendorong pihak sekolah untuk lebih terbuka dalam mengelola keuangan (Wahyuni & Maison, 2022). Partisipasi *stakeholder* juga memperkuat akuntabilitas karena adanya pengawasan

dari berbagai pihak, sehingga pengelola keuangan lebih bertanggung jawab dan potensi penyalahgunaan dana dapat diminimalisir (Nelvia, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka pemikiran penelitian ini menegaskan bahwa transparansi keuangan di SMA Negeri Kota Tasikmalaya dipengaruhi baik secara parsial maupun simultan oleh penerapan teknologi melalui *e-budgeting*, kewajiban internal berupa akuntabilitas, serta pengawasan eksternal melalui partisipasi *stakeholder*. Ketiga faktor ini diyakini saling melengkapi dalam memperkuat transparansi keuangan sekolah, sehingga pengelolaan dana pendidikan dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik.

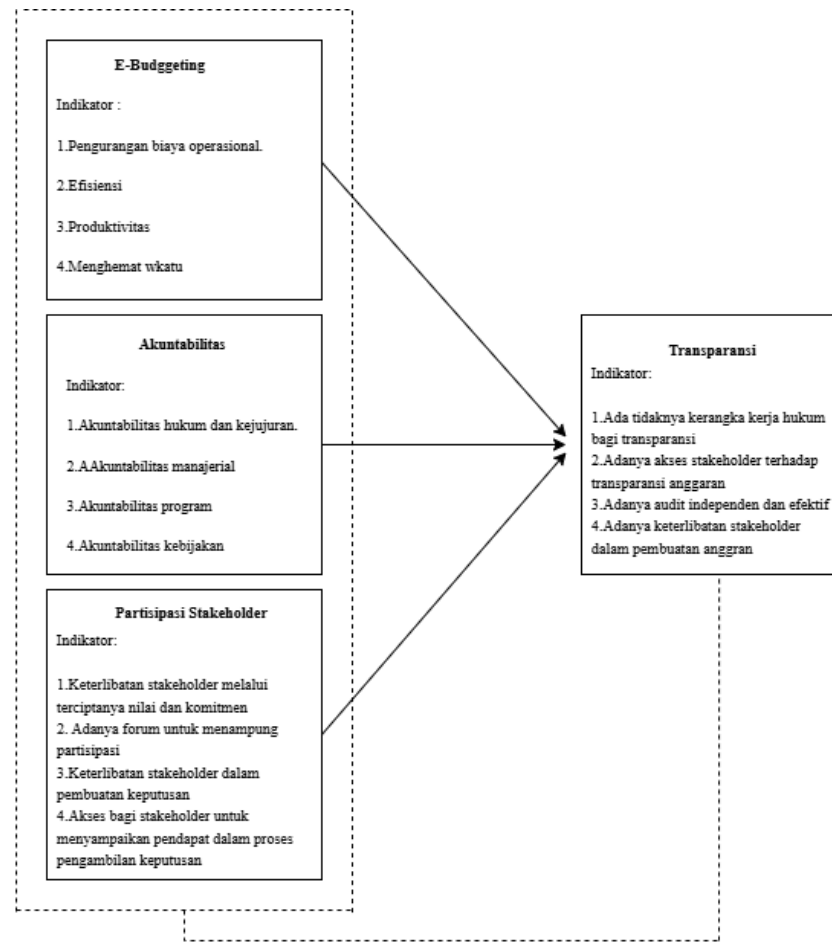
Prinsip *Good Governance* menjadi landasan penting dalam pengelolaan keuangan sekolah. Menurut UNDP (1997), *good governance* mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Dalam konteks penelitian ini, penerapan *e-budgeting*, akuntabilitas, dan partisipasi *stakeholder* dapat dipandang sebagai wujud nyata dari prinsip-prinsip tersebut.

E-budgeting merupakan bentuk penerapan prinsip transparansi dan efektivitas. Sistem digital memungkinkan proses penyusunan, pelaporan, dan pengawasan anggaran dilakukan secara terbuka, efisien, serta meminimalisasi praktik penyalahgunaan. Akuntabilitas mencerminkan kewajiban sekolah untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana sesuai aturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan kejelasan peran, tanggung jawab, serta mekanisme kontrol. Partisipasi *stakeholder* menunjukkan

keterlibatan pihak-pihak terkait (guru, komite sekolah, orang tua, masyarakat) dalam perencanaan dan evaluasi anggaran. Partisipasi ini memperkuat rasa memiliki, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan keputusan yang diambil lebih adil serta sesuai kebutuhan. Transparansi keuangan menjadi *outcome* utama dari penerapan prinsip *good governance*. Dengan adanya keterbukaan informasi, laporan keuangan dapat diakses oleh *stakeholder*, sehingga meningkatkan kepercayaan dan legitimasi pengelolaan dana pendidikan.

Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini menegaskan bahwa penerapan *e-budgeting*, akuntabilitas, dan partisipasi *stakeholder* bukan hanya variabel teknis, tetapi juga bagian dari implementasi prinsip *Good Governance*. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa transparansi keuangan sekolah merupakan indikator keberhasilan tata kelola yang baik dalam sektor pendidikan.

Berdasarkan hasil penyusunan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, maka dapat digambarkan bahwa penelitian ini memiliki alur hubungan logis antara variabel-variabel yang diteliti. Kerangka pemikiran ini menjadi dasar konseptual yang menunjukkan bagaimana variabel independen diperkirakan berpengaruh terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun Bersama-sama. Berdasarkan hasil kerangka pemikiran maka berikut digambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban tidak mutlak atau bersifat sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis perlu melalui pengujian untuk diuji dan

dibuktikan kebenarannya berdasarkan data yang telah diperoleh dari sampel penelitian (Sugiyono, 2023:242).

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan dan didukung oleh tinjauan pustaka serta penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Penerapan *e-budgeting*, akuntabilitas, dan partisipasi *stakeholder* secara bersama-sama berpengaruh terhadap Transparansi di Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Tasikmalaya.
2. Penerapan *e-budgeting* berpengaruh terhadap transparansi keuangan di Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Tasikmalaya.
3. Akuntabilitas berpengaruh terhadap transparansi keuangan di Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Tasikmalaya.
4. Partisipasi *stakeholder* berpengaruh terhadap transparansi keuangan di Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Tasikmalaya.